



PROVINSI LAMPUNG

RENCANA KINERJA TAHUNAN

BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI LAMPUNG

Tahun 2022

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Lampung Tahun 2022 dapat diselesaikan. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan RKT BNNP tahun 2022 ini.

RKT BNNP Lampung merupakan dokumen perencanaan Kinerja BNNP untuk periode 1 (satu) tahun, dan merupakan penjabaran dari Renstra BNNP Lampung 2020-2024. RKT BNNP Lampung Tahun 2022 memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh BNNP Lampung dalam satu tahun anggaran yang memuat, tujuan, sasaran, dan target capaian kinerja yang akan di capai pada tahun 2022. Oleh karenanya, dokumen ini akan menjadi sebagai acuan bagi aparatur di lingkungan BNNP Lampung dalam penyusunan anggaran dalam hal ini Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2022.

Disamping itu, melalui review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan, dokumen ini diharapkan memperjelas kondisi aktual dan tingkat akselerasi pencapaian kinerja serta reformulasi strategi pada setiap unit kerja di BNNP yang disertai dengan kejelasan dan manfaat program/kegiatan yang direncanakan bagi pemerintah maupun masyarakat. Selanjutnya, untuk menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja

BAB IV PENUTUP

Laporan akuntabilitas Kinerja Badan Narkotika Nasional Tahun 2021 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan BNN sebagai pelayanan publik. Secara umum dapat disimpulkan bahwa BNN, telah dapat merealisasikan berbagai capaian melalui implementasi Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba sebagaimana yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja, untuk mencapai tahapan pembangunan jangka menengah tahun 2010-2014.

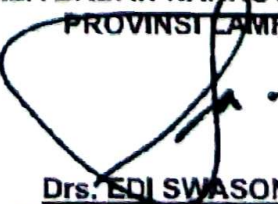
Tugas yang diemban BNNP Lampung adalah mewujudkan masyarakat Provinsi Lampung bebas dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, tugas tersebut merupakan pekerjaan besar yang mustahil mampu dilakukan oleh BNN sendiri. Peran serta masyarakat secara aktif yang didukung kesungguhan jajaran penyelenggara negara dan penegak hukum, merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan harapan tersebut.

Capaian Kinerja BNNP Lampung Pada tahun 2021 menggunakan pengukuran kinerja dilakukan berdasarkan sasaran satu strategi, Dari 18 (delapan belas) indikator kinerja kegiatan tersebut dapat disimpulkan bahwa : **2 Indikator melebihi target yang ditetapkan; 12 indikator mencapai target 100%; 2 indikator di bawah target yang ditetapkan**

Sangat disadari bahwa Laporan Akutabilitas ini belum sempurna seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dapat memperoleh gambaran kinerja yang telah dilakukan oleh BNNP Lampung sepanjang tahun 2021

Bandar Lampung, Januari 2022

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI LAMPUNG,



Drs. EDI SWASONO, M.M
BRIGADIR JENDERAL POLISI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR LAMPIRAN.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	2
C. DASAR HUKUM.....	3
BAB II RENCANA KINERJA TAHUN 2022.....	5
A. RENCANA STRATEGIS 2020-2024.....	5
B. RENCANA KINERJA TAHUN 2022.....	7
BAB III PENUTUP	10

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Rencana Kinerja Tahunan BNNP Lampung Tahun 2022.....	7
Tabel 2 Program, Kegiatan dan Anggaran BNNP Lampung Tahun 2022	10

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Matrik Rencana Volume Rincian Output	1
---	---

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk menjamin tercapainya pelaksanaan tugas dan kegiatan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Lampung sesuai dengan yang telah dirumuskan pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) BNNP Lampung Tahun 2022, maka disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT). RKT merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan atau outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu. RKT menuntut konsistensi antara pelaksanaan kegiatan dengan proses dan ketentuan dalam Renja dan Renstra sehingga diperlukan kompetensi, profesionalisme, dan disiplin pegawai dilingkungan BNNP Provinsi Lampung dalam melaksanakan kegiatannya.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa dokumen RKT adalah tolok ukur untuk mencapai akuntabilitas kinerja instansi, pertanggungjawaban pencapaian visi, misi, dan tujuan BNNP Lampung, serta sebagai dasar dalam penetapan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 bagi Kepala BNNP Provinsi Lampung kepada Kepala BNN RI.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

BNNP Lampung mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia di dalam wilayah Provinsi Lampung.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, BNNP Lampung menyelenggarakan fungsi:

1. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disebut P4GN dalam wilayah Provinsi Lampung;
2. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan dalam wilayah Provinsi Lampung;
3. pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNNK/Kota dalam wilayah Provinsi Lampung;
4. pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah Provinsi Lampung;
5. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Provinsi Lampung;
6. pelayanan administrasi BNNP Lampung; dan
7. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNNP Lampung.

BNNP Lampung terdiri dari:

1. Kepala;
2. Bagian Umum;
3. Bidang Pemberantasan dan Intelijen;
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

C. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Rencana Kinerja Tahunan BNNP Lampung Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
7. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 05 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
8. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

BAB II RENCANA KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2020-2024

1. Visi, Misi dan Tujuan

Visi dan Misi Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Lampung Tahun 2020-2024 mengacu pada Visi dan Misi Badan Narkotika Nasional sebagaimana dimaksud dalam Rencana Strategis Tahun Badan Narkotika Nasional 2020-2024.

Visi Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024 adalah **“Terwujudnya Masyarakat yang Terlindungi dan Terselematkan dari Kejahatan Narkotika”**. Penyalahgunaan narkotika merupakan bahaya yang mampu mengancam keselamatan dan keterlindungan masyarakat Indonesia dengan menyerang faktor kesehatan yang memiliki dampak domino bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Hal tersebut memerlukan upaya yang serius dimana dalam hal ini BNN sebagai *leading sector* dalam hal pencegahan dan pemberantasan tindak kejahatan narkoba di Indonesia. Visi BNN menjadi arahan dan acuan dalam menentukan tindakan BNN pada periode 2020-2024, sehingga diharapkan pemberantasan peredaran gelap narkotika secara profesional dan pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan narkotika secara komprehensif serta pengembangan kapasitas kelembagaan mampu memberikan pelayanan publik yang maksimal sehingga mampu menyelamatkan dan melindungi masyarakat dari ancaman bahaya narkoba.

Demi mencapai Visi BNN 2020-2024 yang ditetapkan, dirumuskan misi-misi yang secara umum akan menjadi upaya-upaya pencapaian kondisi yang diharapkan pada akhir periode Tahun 2024. Berikut ini merupakan misi-misi BNN Tahun 2020-2024:

1. Memberantas Peredaran Gelap dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika secara Professional.
2. Meningkatkan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi dan Pemberdayaan Ketahanan Masyarakat terhadap Kejahatan Narkotika.
3. Mengembangkan dan Memperkuat Kapasitas Kelembagaan.

Berdasarkan Visi dan Misi yang ditetapkan, *core value* dari organisasi BNN adalah pada kekuatan perlindungan dan penyelamatan masyarakat. Di sisi lain, tindak intervensi yang menjadi mandat dan fungsi konstitusional BNN adalah tindak pencegahan dan pemberantasan. Konstruksi relasional dan substantif dari nilai organisasi dan fungsi organisasi mengarahkan pada tujuan BNN tahun 2020-2024, yakni **Melindungi dan Menyelamatkan Masyarakat dari Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba dan Mewujudkan Transformasi Layanan Publik yang Berkualitas**. Dengan kata lain, visi BNN untuk periode 2020-2024 dicapai dengan upaya yang telah ditetapkan dalam tujuan-tujuan BNN.

2. Sasaran Strategis Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis BNN 2020-2024 adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh BNN dalam 5 tahun kedepan yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program. Sasaran Strategis BNN untuk 5 tahun kedepan terdapat tiga sasaran sebagai berikut:

- Sasaran 1 : Menurunnya Penyalahgunaan dan Terkendalnya Peredaran Gelap Narkoba
- Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Keterpulihan Pecandu Narkoba
- Sasaran 3 : Terwujudnya Manajemen Organisasi yang Professional, Produktif, dan Proporsional serta Berkinerja Tinggi

B. Rencana Kinerja Tahun 2022

1. Sasaran dan Indikator Sasaran Strategis

Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung menetapkan rencana kinerja Tahun 2022 sesuai dengan arah kebijakan dan rencana kinerja BNN Tahun 2020—2024. Rencana kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung sebagai gambaran pelaksanaan program kerja BNN dalam satu tahun kedepan di wilayah provinsi bersama seluruh jajaran unit kerja BNN Kabupaten/Kota. Adapun rencana target kinerja dan kebutuhan pendanaan BNN Provinsi Lampung Tahun 2022 sebagai berikut.

Tabel 1.
Rencana Kinerja Tahunan
Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung Tahun 2022

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi	3
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi	3
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “Mandiri” di Wilayah Provinsi	5
4.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari “Bahaya” menjadi “Waspada”	1

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA
			Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi *)	3,00
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	30
			Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	5
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi	2
			Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Wilayah Provinsi	6
			Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNP	3,2
7.	Pelaksanaan Intelijen Berbasis teknologi	Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba	Jumlah jaringan peredaran gelap narkoba dan precursor narkoba yang berhasil dipetakan*)	2
8.	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkoba	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	10
			Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya yang dimusnahkan*)	-
9.	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100
			Nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non narkoba	100
10.	Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkoba	Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21*)	1

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA
11.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNNP	95
			Jumlah BNNK di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	5
12.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNP	94
			Jumlah BNNK di wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	5

**) Indikator Kinerja yang dimandatkan pada beberapa BNN Provinsi*

2. Program, Kegiatan dan Anggaran Tahun 2022

Pelaksanaan anggaran BNNP Lampung Tahun 2022 terdiri dari 2 Program dan 15 Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.11.964.024.000,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2
Program, Kegiatan dan Anggaran
Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung Tahun 2022

Kode	Program / Kegiatan / KRO	Volume	Anggaran
066.01.BL	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)		2.420.753.000
3247	<i>Penyelenggaraan Advokasi</i>		102.000.000
QDE	Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga	5 keluarga	40.000.000
UBB	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa	2 Desa	62.000.000
3248	<i>Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif</i>		105.200.000
BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	1 Kelompok Masyarakat	105.200.000
3251	<i>Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi</i>		110.000.000
BKA	Pemantauan Masyarakat dan Kelompok Masyarakat	2 Laporan	110.000.000
3256	Pascarehabilitasi Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkoba		93.450.000
FAE	Data dan Pelaporan Klien Rehabilitasi	1 Laporan	93.450.000
3257	<i>Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat</i>		249.500.000
QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	2 Lembaga	249.500.000
3258	<i>Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti</i>		172.145.000
BAA	Pelayanan Publik kepada Masyarakat	25 orang	42.625.000
BIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	2 Produk	41.500.000
BIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	10 Orang	88.020.000
3259	<i>Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah</i>		216.865.000
ADG	Standarisasi Profesi dan SDM	5 orang	18.980.000
ADI	Sertifikasi Profesi dan SDM	25 orang	197.885.000
3260	<i>Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat</i>		370.593.000
BAA	Pelayanan Publik kepada Masyarakat	530 orang	221.565.000
BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	17 lembaga	149.028.000
5354	<i>Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotik</i>		700.000.000
BCA	Perkara Hukum Perseorangan	10 Perkara	700.000.000
5355	<i>Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika</i>		210.000.000
BCA	Perkara Hukum Perseorangan	1 Perkara	210.000.000

Kode	Program / Kegiatan / KRO	Volume	Anggaran
5936	<i>Pengelolaan Informasi dan Edukasi</i>		91.000.000
QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1 Lembaga	91.000.000
066.01.WA	Program Dukungan Manajemen		9.543.271.000
3236	<i>Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan</i>		6.603.104.000
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	12 Layanan	6.588.840.000
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	1 Dokumen	14.264.000
3237	<i>Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan SDM</i>		50.462.000
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	52 Orang	50.462.000
3238	<i>Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN</i>		42.298.000
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	2 Dokumen	42.298.000
3239	<i>Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarpras</i>	14 Layanan	2.802.407.000
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1 Layanan	2.709.407.000
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	5 unit	93.000.000
3979	<i>Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan</i>		45.000.000
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1 Layanan	45.000.000
	TOTAL		11.964.024.000

BAB III PENUTUP

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan BNN Provinsi Lampung Tahun 2022 merupakan rincian dari Rencana Program Jangka Menengah BNN Provinsi Lampung tahun 2020-2024. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini merupakan gambaran arah program kerja dan orientasi kinerja BNN Provinsi dan jajarannya selama satu tahun.

Dokumen rencana kinerja tahunan ini akan menjadi rujukan dalam penyusunan rencana kerja anggaran seluruh unit kerja di wilayah provinsi Lampung, serta dokumen ini juga dapat dilakukan penyesuaian dikemudian hari apabila terdapat kebijakan atau faktor-faktor yang mengharuskan dilakukan penyesuaian adaptasi kebijakan terkait.

Lampiran 1
Matrik Rencana Volume Rincian Output
Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung Tahun 2022

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	RENCANA VOLUME
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	SMP dan SMU Sederajat yang Memperoleh Pengembangan <i>Soft Skill</i>	1 Lembaga
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	Advokasi Program Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber daya Desa	2 Desa
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di Wilayah Provinsi	Advokasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba	2 Lembaga
4.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	1. Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada" 2. Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi *)	Fasilitasi Program Alternative Development pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika	1 Kelompok Masyarakat
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	Petugas rehabilitasi berbasis masyarakat yg diberikan pelatihan	5 Orang
		Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	Tenaga rehabilitasi yg diberikan peningkatan kompetensi teknis	25 Orang
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi	Layanan Rehabilitasi di BNNP dan BNNK/Kota	100 orang
			Layanan IBM	20 orang

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	RENCANA VOLUME
			Layanan Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba (SHKPN)	400 orang
			Layanan Pemeriksaaan Psikologi tipe A	5 orang
			Layanan Pemeriksaaan Psikologi tipe B	5 orang
			Lembaga rehabilitasi yang operasional	10 Lembaga
			Fasilitasi Lembaga Rehabilitasi di BNNK/Kota	5 Lembaga
		Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi	Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang terbentuk	
7.	Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Provinsi Lampung	Data dan Pelaporan Klien Rehanlitasi	1 Laporan
8.	Pelaksanaan Intelijen Berbasis teknologi	Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berhasil dipetakan*)	Laporan Informasi Intelijen Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	2 Laporan
8.	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika	10 Perkara
		Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya*)	Operasi Pemusnahan Titik Lokasi Lahan Tanaman Narkotika	-
9.	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	Layanan pengawasan dan pengelolaan barang bukti narkotika dan non-narkotika	2 produk
		Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	Layanan pengawasan dan perawatan tahanan tindak pidanan narkotika, prekursor narkotika dan TPPU	10 orang

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	RENCANA VOLUME
10.	Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21*)	Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika	1 Perkara
11.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	1. Nilai Kinerja Anggaran BNNP 2. Jumlah BNNK di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Dokumen
			Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 Dokumen
12.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNP 2. Jumlah BNNK di wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	Layanan Manajemen Keuangan	1 Dokumen
			Layanan Perkantoran	12 bulan